



Politea : Jurnal Pemikiran Politik Islam

P-ISSN : 2621-0312

E-ISSN : 2657-1560

Vol. 7, No. 2 Tahun 2024

DOI : <http://dx.doi.org/10.21043/politea.v7i2.30709>

Konstruksi Sosial Dakwah Politik Ulama Perempuan Pantura

Siti Malaiha Dewi

Institut Agama Islam Negeri Kudus
malaihadewi@iainkudus.ac.id

Submitted: January 15th, 2025

Revised: January 24th, 2025

Accepted: January 24th, 2025

Abstract

The role of women clerics in politics is rare, especially in practical politics. However, on the North Coast of Java (Pantura), there are female scholars who, in addition to running Islamic boarding schools, also carry out political da'wah by engaging in practical politics. This paper aims to analyze how the social construction of political da'wah is carried out. The type of research is field research with a qualitative approach. The key person of this research is Nyai DN, the caretaker of the Kauman Lasem Islamic Boarding School who was once a member of the Rembang Regency DPRD from PKB. Then, there is also Nyai RJ, the caretaker of the Al Hamidiyah Lasem Islamic boarding school and the chairperson of the Women's Union, PPP. The theory used is the Social Construction of Peter L. Berger and Thomas Luckmann. The results of the study show that the political da'wah of women scholars is the result of social construction formed through a simultaneous dialectic between the knowledge of women scholars and social reality through the mechanism of internalization, objectification, and externality. The basis of political da'wah of women scholars is the idea that politics is a jihad for the improvement of women's fate. This thinking is obtained through experiences that are internalized continuously by significant others, namely the family environment, fathers and husbands who first entered politics. Women scholars externalize knowledge that has been manipulated by political da'wah actions culturally and structurally.

Keywords: Social Construction, Political Dakwah, Women Clerics.

Abstrak

Dibandingkan dengan bidang lainnya, kiprah ulama perempuan di politik masih jarang. Namun, di Pantai Utara Jawa (Pantura), terdapat ulama perempuan yang selain mengampu pondok pesantren juga melakukan dakwah politik dengan terjun ke politik

praktis. Tulisan ini bertujuan menganalisa bagaimana konstruksi sosial atas dakwah politik yang mereka lakukan. Guna mendapat jawaban, maka jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Key person penelitian ini adalah Nyai DN pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang dari PKB. Lalu, ada pula Nyai RJ, pengasuh pondok pesantren Al Hamidiyah Lasem dan menjadi ketua Wanita Persatuan, PPP. Teori yang digunakan adalah Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwah politik ulama perempuan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui dialektika secara simultan antara pengetahuan ulama perempuan dengan realitas sosial melalui mekanisme internalisasi, obyektifikasi, dan eksternalitas. Basis dakwah politik ulama perempuan yaitu pemikiran bahwa politik sebagai jihad untuk perbaikan nasib perempuan. Pemikiran ini diperoleh melalui pengalaman yang diinternalisasikan secara terus menerus oleh *significant others* yaitu lingkungan keluarga, bapak maupun suami yang terlebih dahulu terjun ke politik, dan juga habituasi pengalaman organisasi. Ulama Perempuan mengeksternalisasi pengetahuan dengan tindakan dakwah politik secara kultural dan struktural, kemudian diobyektifikasi dan diinternalisasi kembali.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Dakwah Politik, Ulama Perempuan Pantura

Pendahuluan

Kemunculan ulama perempuan di ranah publik bukan sesuatu yang langka lagi di Indonesia. Sebut saja, Shinta Nuriyah Wahid, Siti Musdah Mulia, Maria Ulfah Anshor, Khofifah Indar Parawansa, Lily Zakiyah Munir, Aisyah Hamid Baidlowi, Badriyah Fayumi, dan masih banyak lagi. Bahkan, jauh sebelum kehadiran mereka, ulama perempuan pun sudah hadir pada masa-masa pergerakan kemerdekaan Indonesia, seperti Siti Walidah/Nyai Ahmad Dahlan (1872-1946 M) penggerak Aisyiyah dan *muballighah* terkemuka yang memiliki pengaruh besar, terutama kepada perempuan Muhammadiyah. Melalui “Sopo Tresno” Nyai Walidah mengajak, memahamkan, dan membentuk kesadaran perempuan tentang pentingnya organisasi dan perjuangan. Pada tahun 1922 perkumpulan ini resmi menjadi organisasi perempuan Islam Muhammadiyah yang bernama Aisyiyah (‘Aisyiyah (Association). Pimpinan Pusat, 1992) Organisasi perempuan lainnya adalah Muslimat NU yang Digagas oleh ulama perempuan Ny. R. Djuaesih dan Ny. Siti Sarah pada Tahun 1938, dan resmi berdiri pada tahun 1946.

Organisasi ini didirikan atas dasar keprihatinan akan nasib dan keadaan perempuan yang mendapat perlakuan tidak adil dan selalu dianggap lemah (NU, 1979).

Seiring perjalanan Bangsa Indonesia, peran ulama perempuan pun mengalami fase-fase yang berbeda. Masa Orde Baru, peran ulama perempuan agak terpinggirkan akibat kebijakan politik yang cenderung sentralistik dan kurang memberikan ruang bagi perempuan dalam pengambilan keputusan keagamaan. Perempuan lebih banyak terlibat dalam bidang pendidikan informal, seperti di pesantren, majelis taklim, dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Peran mereka juga sering kali tidak diakui secara formal dalam struktur keulamaan. Era Reformasi memberikan peluang lebih besar bagi ulama perempuan untuk tampil di ruang publik. Perempuan mulai diakui dalam diskursus keagamaan dan pemberdayaan umat. Tonggak penting terhadap pengakuan peran ulama perempuan adalah saat digelarnya Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) pada tahun 2017 dihadiri lebih dari 500 ulama perempuan, dengan mengusung isu-isu kontemporer seperti kesetaraan gender, kekerasan terhadap perempuan, dan perlindungan anak (Tim KUPI, 2017). Isu tersebut berkembang pada KUPI kedua (2022) yang merespon tentang Krisis Ekologi dan Keberlanjutan Lingkungan, Pernikahan Anak dan Perlindungan Anak, Moderasi Beragama, dan Hak Perempuan dalam Kepemimpinan. Langkah strategis yang direkomendasikan terkait isu perempuan dan kepemimpinan adalah pentingnya perempuan berada dalam posisi kepemimpinan, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial politik (Tim KUPI, 2022).

Dibandingkan dengan bidang lainnya, kiprah ulama perempuan di dunia politik memang jarang, apalagi politik praktis. Padahal realitanya, otoritas keagamaan yang dimilikinya mampu menggerakkan massa untuk berpartisipasi politik (Muhammad, 2020). Fenomena ini juga yang terjadi di Kabupaten-kabupaten sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura), terdapat banyak ulama perempuan yang mengampu pondok pesantren tetapi sedikit yang terjun di dunia politik. Salah satu yang terjun ke dunia politik diantaranya adalah Bu Nyai DN yang selain menjadi pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem juga

pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lalu, ada pula Bu Nyai RJ, pengasuh pondok pesantren Al Hamidiyah Lasem yang memiliki santri lebih dari 2000. Beliau menjadi ketua Wanita Persatuan yang merupakan organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Rembang. Kiprah beliau di dunia politik sudah lama, mengingat keluarga seperti ayahnya juga pernah menjadi anggota DPR RI, DPRD Jawa Tengah dan DPRD Kabupaten Rembang dan Suaminya pun menjadi anggota DPRD Jawa Tengah. Maka, menarik untuk digali lebih mendalam bagaimana proses internalisasi dan obyektivasi kedua ulama perempuan tersebut sehingga memutuskan untuk mengeksternalisasikan diri berkiprah di politik praktis atau diistilahkan oleh keduanya sebagai dakwah politik, yaitu menjadikan politik sebagai sarana memperjuangkan umat berdasar nilai-nilai Islam. Teori yang digunakan untuk menganalisis proses - proses tersebut pada penelitian ini adalah teori konstruksi sosialnya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Berger, 1996). Realitas dalam teori konstruksi sosial terdiri dari Realitas objektif (realitas yang berada di luar diri manusia) dan realitas subjektif (realitas yang berada dalam diri manusia) yang saling berdialektik secara simultan melalui proses internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi.

Sejauh ini, penelitian tentang ulama perempuan dengan menggunakan teori konstruksi sosial sudah dilakukan, diantaranya oleh Chabibi (Muhammad Chabibi, 2021) yang mengidentifikasi dua penyebab minimnya ulama perempuan berkiprah di ranah publik, yaitu *cultural lag* atau ketertinggalan budaya yang dialami oleh perempuan dibanding laki-laki, dan Ahistorisme (keterputusan) intelektual perempuan akibat budaya patriarkhi. Penelitian senada dilakukan Isnatin Ulfa (Ulfa, 2012) yang menunjukkan bahwa budaya patriarkhi yang menjadi penyebab sedikitnya ulama perempuan bekerja di area intelektual juga dunia politik, dan lingkup sosial. Ati'ianah (Ati'ianah, 2024) dalam penelitiannya membandingkan konstruksi sosial perempuan dalam ruang publik di Aceh dan Jawa pada abad 17-19. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun keduanya berada dalam struktur patriarkal, perempuan Aceh memiliki akses yang lebih luas ke ranah

publik dibandingkan dengan perempuan Jawa. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sistem kesultanan Aceh yang memberikan ruang bagi perempuan untuk terlibat dalam politik, serta pengaruh Islam yang lebih inklusif terhadap perempuan di Aceh. Meskipun kedua penelitian ini sudah menggunakan teori konstruksi sosial, namun keduanya lebih berfokus kepada realitas obyektif yang menjadi faktor penyebab minim atau maksimalnya peran ulama perempuan di publik. Realitas subyektif dan dialektika keduanya melalui proses internalisasi, obyektivasi, dan eksternalisasi belum dijelaskan secara detail.

Tujuan penelitian ini menjelaskan bagaimana konstruksi sosial dakwah politik kedua ulama perempuan di Pantura dilihat dari realitas subjektif maupun objektif serta dialektika keduanya melalui tiga proses baik internalisasi, obyektivasi, maupun eksternalitasnya. Konstruksi sosial atas dakwah politik mereka berdua akan memberikan gambaran, tantangan serta potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan untuk ulama perempuan yang terjun ke dunia politik praktis penelitian ini juga menyumbang pada kelompok perempuan yang akan terjun ke politik praktis bahwa menjadi perempuan dan menjadi ulama tidak menghalangi untuk berkiprah dan berjihad melalui jalur politik.

Ulama perempuan sebagai orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki, yang memiliki perspektif gender untuk memahami teks-teks keagamaan (Tim KUPI, 2017).

Kerangka Teori

Teori dasar yang digunakan untuk membaca, menganalisis dan menjelaskan hasil penelitian adalah teori konstruksi sosialnya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (Berger, 1996). Menurut keduanya, teori konstruksi sosial memfokuskan pada tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dari realitas sosialnya. Jadi, realitas sosial merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu sebagai mesin produksi dan reproduksi yang kreatif dalam mengkonstruksi dunia sosialnya dan individu bukanlah korban fakta

sosial sebagaimana dilihat oleh Durkheim. Aktor yang dimaksud pada penelitian ini adalah Nyai Durrotun Nafisah dan Nyai Roudlotul Jannah.

Proses berlangsungnya konstruksi sosial menurut Berger dibangun melalui dua cara: *Pertama*, mendefinisikan tentang kenyataan atau "realitas" dan "pengetahuan". Realitas sosial adalah seluruh kejadian/ fenomena sosial yang diciptakan atau dialami oleh individu yang tidak bisa ditolak oleh imajinasi atau angan-angan atau keinginan tertentu. Realitas sosial tersirat di dalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi bahasa, kerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan seterusnya. Realitas sosial ditemukan dalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan "pengetahuan" berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan segala aspeknya, meliputi ranah kognitif, psikomotorik, emosional dan intuitif. pengetahuan merupakan basic bagaimana tindakan dan struktur masyarakat diciptakan dan berkembang. Pengetahuan adalah aliran pengalaman kehidupan sehari-hari individu yang terkumpul terkumpul dan menjadi pengetahuan yang mapan dan digunakan individu untuk menjadi referensi melakukan tindakan sehari-hari. Pengalaman dari waktu ke waktu dipilih disarikan atau diteoritisasikan serta diilmiahkan oleh individu sehingga mengakar dalam individu dan menjadi *stock of knowledge* atau teori/ pengetahuan ilmiah bagi individu yang kemudian mengakar dan berkembang menjadi identitas, ideologi, dan seterusnya. Maka, Mempelajari individu dan Masyarakat adalah harus mempelajari pengalaman itu diciptakan dan diteoritisasikan untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari;

Kedua, untuk meneliti sesuatu yang intersubjektif tersebut, Berger menggunakan paradigma berpikir Durkheim mengenai objektivitas, dan paradigma Weber mengenai subjektivitas. Jika Durkheim memposisikan objektivitas di atas subjektivitas (masyarakat di atas individu), Weber menempatkan subjektivitas di atas objektivitas (individu di atas masyarakat), maka Berger melihat keduanya sebagai entitas yang tidak terpisahkan. Masyarakat menurut Berger merupakan realitas objektif sekaligus subjektif. Sebagai realitas objektif, masyarakat berada di luar diri manusia dan berhadapan dengannya. Sedangkan sebagai realitas subjektif, individu berada di dalam masyarakat sebagai

bagian yang tak terpisahkan. Dengan kata lain, bahwa individu adalah pembentuk masyarakat dan masyarakat juga pembentuk individu.

Realitas sosial menurut Berger bersifat ganda (plural) dan bukan tunggal, yaitu realitas objektif dan subjektif. Realitas objektif adalah realitas yang berada di luar diri manusia, sedangkan realitas subjektif adalah realitas yang berada dalam diri manusia. Dalam teori konstruksi sosial terdapat proses dialektika antara dunia subjektif dan dunia objektif (Sulaiman, 2016).

Proses dialektik itu mencakup tiga momen simultan, yaitu eksternalisasi (penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia), objektivasi (interaksi dengan dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami institusionalisasi), dan internalisasi (individu mengidentifikasi dengan lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya). Tahap eksternalisasi dan objektivasi merupakan pembentukan masyarakat yang disebut sebagai sosialisasi primer, yaitu momen dimana seseorang berusaha mendapatkan dan membangun tempatnya dalam masyarakat. Dalam kedua tahap ini (eksternalisasi dan objektivasi) seseorang memandang masyarakat sebagai realitas objektif (*man in society*). Sedangkan dalam tahap internalisasi, seseorang membutuhkan pranata sosial (*social order*), dan agar pranata itu dapat dipertahankan dan dilanjutkan, maka haruslah ada pembenaran terhadap pranata tersebut, tetapi pembenaran itu dibuat juga oleh manusia sendiri melalui proses legitimasi yang disebut objektivasi sekunder. Pranata sosial merupakan hal yang objektif, independen dan tak tertolak yang dimiliki oleh individu secara subjektif. Ketiga momen dialektik itu mengandung fenomena-fenomena sosial yang saling bersintesa dan memunculkan suatu konstruksi sosial atau realitas sosial, yang dilihat dari asal mulanya merupakan hasil kreasi dan interaksi subjektif.

Melalui pembacaan teori Berger ini akan diperoleh deskripsi, pemahaman dan pemikiran kedua ulama perempuan yang menjadi subyek penelitian ini. Sistem pengetahuan ini akan digali juga latar belakangnya, sebab Berger dalam teori konstruksi

sosial-nya bahwa sistem pengetahuan seseorang tidak bisa terlepas dari latar belakang atau *setting* yang melatarbelakanginya.

Setting yang melatarbelakangi kiprah kedua ulama perempuan pun akan dianalisa dengan analisa gender. Analisis kontruksi gender sebagai sesuatu yang berbeda dengan fakta biologis ini menjadi dasar kerangka teoritis untuk mendapat pengetahuan baru dalam rangka mengungkap bentuk relasi asimetris yang tersembunyi atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.

Analisa gender adalah proses penganalisaan data dan informasi secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab dalam proses pembangunan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat (APKM). Analisis Gender dapat juga diartikan sebagai suatu analisa yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, perencana untuk menilai kelayakan dan dampak kebijakan yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki atas program dan/atau peraturan yang diusulkan dan dilaksanakan. Analisa gender mengakui bahwa realitas kehidupan perempuan serta laki-laki adalah berbeda, sedangkan kesempatan yang sama tidak harus berarti menghasilkan hasil yang sama. Analisa gender timbul dari keperluan untuk menjadikan pengalaman, perhatian, sebagai perempuan dan sebagai laki-laki ke dalam arusutama. Analisa gender mengidentifikasi isu-isu gender yang disebabkan karena adanya perbedaan-perbedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena perbedaan-perbedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya perbedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada perbedaan antara keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari pembangunan, berpartisipasi dalam pembangunan serta memperoleh manfaat yang adil dari hasil pembangunan.

Analisis gender gender berfokus pada memahami perbedaan-perbedaan gender dalam peran, aktivitas, kebutuhan dan kesempatan pada konteks tertentu. Analisa gender menyoroti perbedaan peran laki-laki dan perempuan. Hal ini beragam sifatnya

menurut waktu, budaya, kelas sosial, etnik dan faktor-faktor lainnya. Itu sebabnya analisa gender: tidak memperlakukan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok yang homogen, tetapi memperlakukan sifat-sifat atas dasar gender sebagai sesuatu yang dapat diubah dan memerlukan data terpisah menurut jenis kelamin.

Analisa gender yang diaplikasikan untuk intervensi pembangunan dapat mendorong: (1). Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender atau faktor penyebab terjadinya kesenjangan; (2). Mengidentifikasi isu-isu gender, yaitu isu yang muncul karena adanya perbedaan-perbedaan atas dasar gender yang mungkin terjadi diantara anggota keluarga dan/atau di dalam masyarakat dalam memperoleh akses, kontrol, partisipasi dan manfaat dalam pembangunan; (3). Memungkinkan para perencana melakukan perencanaan yang efektif, efisien, berkeadilan dan memberdayakan melalui rancangan kebijakan dan strategi yang tepat dan sensitif terhadap isu-isu gender.

Metode Penelitian

Guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan – pertanyaan pada penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Kualitatif. Creswell mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat dipahami (Creswell, 2014).

Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap *Key person* Nyai DN pengasuh Pondok Pesantren Kauman Lasem yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lalu, ada pula Nyai RJ, pengasuh pondok pesantren Al Hamidiyah Lasem yang juga menjadi ketua Wanita Persatuan yang merupakan organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah analisis data yang dikemukakan Creswell, sebagai berikut: 1) Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dimulai dengan mentranskrip wawancara, memilah dan menyusun data ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi. 2) Membaca keseluruhan data dengan membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. 3) Menganalisis lebih detail dengan mengkode data. Coding merupakan proses mengolah materi/ informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap, yaitu: mengambil data tulisan atau gambar yang telah dikumpulkan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau paragraf atau gambar ke dalam kategori, kemudian melabeli kategori-kategori dengan istilah khusus. 4) Menerapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori-kategori, dan tema-tema yang dianalisis. 5) Menyajikan deskripsi dan tema-tema dalam bentuk narasi/ laporan kualitatif. 6) Interpretasi makna dari tema atau deskripsi (Creswell, 2014).

Hasil dan Pembahasan

1. Relasi Politik Ulama Di Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang menjadi salah satu kota santri di Jawa Tengah karena daerah ini di penuhi dengan pondok pesantren. Dari sekian banyak pondok pesantren tentunya ada beberapa pondok pesantren yang sangat menonjol dalam berbagai hal, salah satunya adalah tokoh kiainya. Para kiai tersebut tidak hanya sekedar menjalankan pondok pesantren juga tetapi juga terjun ke dalam ranah politik, terlebih karena ketokohnya yang kuat akibat dari jumlah santrinya yang banyak. Dengan berbagai kelebihan yang ada, para kiai tersebut berpolitik melalui partai politik islam salah satunya PPP. Dalam penelitan ini peneliti menemukan ada dua familism yang kuat di dalam internal PPP Rembang, yaitu keluarga dari KH Maimoen Zubair dan keluarga Almarhum KH Achmad Thoyfoer. Kedua keluarga tersebut sudah banyak dikenal oleh masyarakat Rembang. Bukan hanya itu, orang-orang di luar Rembang yang masuk kedalam PPP

tentunya akan sangat mengetahui kedua sosok tersebut, karena baik Kiai Maimoen ataupun Kiai Thoyfoer sangat berjasa di PPP.

Familisme yang diciptakan oleh Kiai Maimoen dan Kiai Thoyfoer sangat kuat bahkan mampu mengantarkan kerabatnya hingga posisi struktural skala kabupaten/kota, regional maupun nasional. Bukan hanya keturunannya tetapi kerabat dekat dan orang kepercayaan juga mampu berhasil melalui pengaruh dari kedua Kiai tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, meskipun kedua familisme ini sama-sama memiliki pengaruh namun keduanya memiliki pola familisme yang berbeda dan bahkan hubungan yang berbeda. Hubungan familisme yang tercipta tidak hanya berdasarkan faktor keturunan seorang Kiai tetapi juga kedekatan mereka dengan para Kiai. Mereka ini biasa dijuluki sebagai “murid politik” kiai oleh Gus Arwani. Orang-orang yang masuk dalam murid politik kiai biasanya mereka merupakan pengurus atau kader partai yang mencuri perhatian sang kiai atau para politisi yang sering sowan kepada para kiai. Dalam sowan tersebut mereka akan mendapatkan berbagai macam wejangan yang berkaitan dengan kehidupan politik mereka, kemudian rekomendasi-rekomendasi melalui jaringan-jaringan yang dimiliki sehingga mampu mempengaruhi kehidupan politik orang-orang tersebut.

Sepeninggalan KH. Thoyfoer dan KH Maimoen Zubair di dalam struktural politik, maka estafet tradisional authority beralih kepada keturunan dan santrinya. PPP memberikan ruang yang cukup besar bagi putra kiai atau keluarga kiai yang ingin melanjutkan bidang politik yang telah di jalankan kedua tokoh pembesar PPP sebelumnya. Relasi yang dibangun kedua kiai tersebut menciptakan dua basis yaitu basis keluarga dan basis santri. Basis keluarga ini merupakan politik kekerabatan yang berlangsung dalam lingkaran keluarga kiai. Keluarga yang masuk didalamnya ada anak kandung, menantu, cucu, kakak adik dsb. Basis dari relasi menjadi relasi emas karena cukup untouchable, tidak ada orang yang berani untuk melangkahi lingkup ini. Sedangkan basis santri merupakan politik kekerabatan yang berlangsung dalam lingkaran antara guru dengan murid yaitu para santri pondok atau murid politik dari kiai

tersebut. Mereka menjadi orang yang mampu memiliki posisi atau kedudukan penting karena campur tangan daripak kiai. Biasanya orang-orang ini bukanlah berasal dari kalangan sesama kiai tetapi memiliki keistimewaan tersendiri di mata sang kiai, sehingga mereka mampu menjalin hubungan secara emosional dengan sang kiai.

Berasal dari kedua basis tersebut, akhirnya menciptakan sebuah relasi didalam internal kepengurusan PPP. Relasi ini yang pada akhirnya menciptakan sebuah koloni untuk menguasai internal partai. Mereka yang masuk kedalam koloni tersebutlah orang-orang yang akan menduduki posisi struktural partai dengan menjadi pengurus. Pengurus partai inilah yang akan menciptakan kebijakan partai kedepan dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum sebagai pucuk pimpinan. PPP dengan simbol-simbol kiainya memiliki kebijakan bahwasannya penentu kebijakan diberikan kepada para kiai di internal partai, terkhusus di PPP Rembang. Maka nantinya kita akan menemukan kepengurusan yang diisi oleh kiai, kerabat kiai atau santrinya secara terus menerus. Setiap periode tidak ada yang berbeda latar belakangnya namun bisa di isi oleh orang yang berbeda dengan latar belakang yang sama.

Relasi familism dalam kepengurusan ini membawa dampak pada politik struktural negara khususnya daerah Rembang, seperti posisi Rembang I (Bupati) dan Rembang II (Ketua DPRD). Relasi yang dibangun sangat berpengaruh dalam proses rekrutmen calon yang akan diusung oleh partai PPP. Orang-orang dalam lingkaran relasi tersebut tentunya memiliki peluang yang cukup besar untuk menduduki posisi sebagai calon bupati, calon wakil bupati atau calon legislatif dengan nomer urut satu. Oleh karena itu mengapa dalam proses rekrutmen bagi penguasa Rembang tentu erat kaitannya dengan familism yang dibangun. Bahkan di satu sisi ada yang mnegatakan hal tersebut menjadi wewenang para kiai yang ada di Majelis Syariah baik setingkat cabang ataupun pusat. Itu sebabnya kita bisa melihat seseorang dengan posisi dan kedudukan yang sama padahal sudah berganti periode.

Di wilayah Lasem Rembang, keluarga yang paling dipandang, berpengaruh dan terkenal adalah keluarga KH. Achmad Thoyfoer. Keluarganya sangat di kenal melalui

pengasuhannya terhadap Pondok Pesantren Al-Hamidiyyah Lesam Rembang. Pondok tersebut memiliki kurang lebih 1500 santri yang belajar didalamnya. Bukan hanya berbentuk Pondok Pesantren, tetapi juga ada madrasah, taman kanak-kanak dan TPQ. Keluarga KH Thoyfoer yang berkiprah bukan hanya dalam urusan pendidikan tetapi juga urusan politik dengan bergabung di NU dan PPP. Sebagai seorang kiai dan politisi pengaruh keluarganya sangat kuat hingga menurun kepada anak-anaknya. Pengaruh tersebut menyebar kepada seluruh santrinya dan seluruh masyarakat di Lasem, Rembang. Bahkan setelah menjadi anggota dewan, pengaruhnya sangat besar bagi PPP setingkat Nasional. Sosok KH. Achmad Thoyfoer merupakan seorang kiai sekaligus politisi di wilayah Lasem Rembang. Seorang pengasuh pondok pesantren Al-Hamidiyah ini pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan.

2. Kiprah & Dakwah Politik Ulama Perempuan

Ulama merupakan lapisan elit dalam struktur masyarakat Islam. Ia memiliki peran yang sangat penting dalam setting sosial budaya masyarakat Muslim, baik yang bertradisi Sunni maupun Syi'ah (Takim, 2006: 14). Peran ulama di masyarakat ini diperkuat oleh teks-teks teologis yang mengukuhkan ulama sebagai pewaris Nabi. Dengan demikian, otoritas keagamaannya menjadi satu hal yang tidak tertolak. Melalui otoritas agama yang dipegangnya, seorang ulama membentuk postulat Islam dalam masyarakat. Tidak hanya dipandang sebagai penyampai dan penafsir teks-teks keagamaan kepada masyarakat, ulama juga berperan sebagai penjaga agar masyarakat berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang digariskan oleh agama, termasuk menentukan. Apakah sebuah praktik keagamaan yang dijalani oleh masyarakat Muslim itu sesuai atau tidak sesuai dengan ajaran agama.

Namun, bagaimanapun lahirnya ulama perempuan di Indonesia juga melalui proses yang tidak mudah. Ini misalnya bisa terlacak dari relasi antara pesantren dengan kelahiran ulama perempuan. Pesantren adalah Lembaga pendidikan Islam penting dalam konteks masyarakat Islam Indonesia dari dulu hingga kini. Dalam konteks lahirnya ulama di nusantara, tak bisa dipungkiri bahwa pesantren merupakan merupakan salah satu

lembaga Pendidikan Islam yang melahirkan ulama atau orang-orang yang memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Di tengah-tengah desakan modernisasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan Islam, keberadaan pesantren tetap dipandang penting sebagai salah satu tempat Islam diajarkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Kesimpulan

Dakwah politik ulama perempuan merupakan hasil konstruksi sosial yang terbentuk melalui dialektika secara simultan antara pengetahuan ulama perempuan dengan realitas sosial melalui mekanisme internalisasi, obyektifikasi, dan eksternalitas. Basis dakwah politik ulama perempuan yaitu pemikiran bahwa politik sebagai jihad untuk perbaikan nasib perempuan. Pemikiran ini diperoleh melalui pengalaman yang diinternalisasikan secara terus menerus oleh significant others yaitu lingkungan keluarga, bapak maupun suami yang terlebih dahulu terjun ke politik, dan juga habituasi pengalaman organisasi. Ulama Perempuan meng eksternalisasi pengetahuan yang sudah diobyektifikasi dengan tindakan dakwah politik secara kultural dan struktural.

Selanjutnya, hendaknya ulama-ulama perempuan memiliki jihad yang sama di bidang politik untuk mencipta dunia yang adil dan ramah perempuan dengan aksi maupun mencipta pemikiran-pemikiran politik dan tidak anti terhadap politik. Selain itu, hendaknya ulama perempuan berjejaring dengan ulama laki-laki maupun berbagai pihak untuk mewujudkan jihad gender tersebut. Semoga bisa.

Referensi

- Ati'ianah. (2024). *Konstruksi Sosial Perempuan dalam Ruang Publik di Aceh pada Abad ke 17-19 M : Studi Komparatif dengan Jawa*. In *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI) (Vol. 1)*.
- Berger, P. L. . L. (1996). *The Social Construction of Reality*. Garden City: Dobleday.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (3rd ed.)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- 'Aisyiyah (Association). Pimpinan Pusat. (1992). *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan 'Aisyiyah*. Jakarta Indonesia: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Muhammad Chabibi. (2021). Ulama Perempuan Indonesia: Resistensi Terhadap Konstruksi Sosial Patriarki. *Asketik*, 5(1), 112–136. doi:10.30762/asketik.v5i1.125
- Muhammad, K. H. H. (2020). *Perempuan Ulama Di Atas Panggung Sejarah* (1st ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- NU, P. M. (1979). *Sejarah Muslimat Nahdlatul Ulama*. Jakarta Indonesia: P.P. Muslimat N.U.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15–22. doi:10.33019/society.v4i1.32
- Tim KUPI. (2017). *Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia*. KUPI.
- Tim KUPI. Dokumen Kongres 2 (2022). Retrieved from [https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_\(KUPI\)_Ke-2](https://kupipedia.id/index.php/Term_of_Reference_Kongres_Ulama_Perempuan_Indonesia_(KUPI)_Ke-2)